



**PENILAIAN *UNDERGROUND ECONOMY*
INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MONETER**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Avi Yulianti

NIM 7111414003

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 22 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing



Prasetyo Ari Bowo S.E., M.Si

NIP. 197902082006041002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Desember 2018

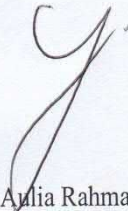
Penguji I



Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si.

NIP. 196812091997022001

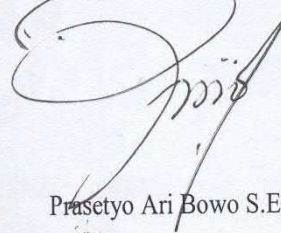
Penguji II



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

NIP. 198701222014041001

Penguji III



Prasetyo Ari Bowo S.E., M.Si

NIP. 197902082006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.BA., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Avi Yulianti

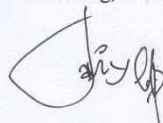
NIM : 7111414003

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 20 Juli 1996

Alamat : Desa Kuryokalangan, RT.03/RW.04, Kec. Gabus,
Kab. Pati, Jawa Tengah 59173

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 22 November 2018



Avi Yulianti

NIM 7111414003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Berproseslah sebaik mungkin dan bersabar semaksimal mungkin, karena di dunia ini tidak ada yang instan

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua tercinta, Bapak Supaat S.pd dan Ibu Mukminah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
- ❖ Keluarga besar tercinta, Kakek Nenek, Om dan Tante yang juga tiada hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- ❖ Vicky Julianto, sosok yang spesial bagi penulis, yang selalu menemani dalam setiap perjuangan penulis.
- ❖ Almamater Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penilaian *Underground Economy* Indonesia dengan Pendekatan Moneter**”. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik dalam bentuk bimbingan, motivasi, kritik, saran maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rasa hormat dan bangga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Fafurida, S.E., M.Sc., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.
4. Prasetyo Ari Bowo, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
5. Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si., Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Yozi Aulia Rahman, S.E, M.Sc., Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Prof. Dr. Rusdarti, M.Si., Dosen Wali Ekonomi Pembangunan A 2014 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
10. Orang tua, keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan baik material maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Ekonomi Pembangunan A 2014, teman-teman baikku Septi, Fara, dan seseorang yang spesial Vicky Julianto yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan senang hati apabila terdapat kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 22 November 2018

Penyusun

SARI

Yulianti, Avi. 2018. “Penilaian *Underground Economy* Indonesia dengan Pendekatan Moneter”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si.

Kata Kunci : *Underground economy*, Pendekatan Moneter, Permintaan Uang Kartal, Potensi Pajak yang Hilang

Salah satu masalah utama dalam memperkirakan GDP adalah tidak adanya statistik ekonomi dan sosial resmi yang dapat diandalkan, akurat, tepat waktu, dan konsisten. Salah satunya adalah bahwa statistik resmi tidak memperhitungkan kegiatan *underground economy* ketika memperkirakan GDP. Berkembangnya kegiatan *underground economy* diyakini berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengetahui besarnya nilai kegiatan *underground economy* di Indonesia pada periode 2009.Q1- 2016.Q4. (2) menganalisis dan mengetahui besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan *underground economy* tersebut.

Penelitian ini menggunakan data *time series* triwulanan berdasarkan periode 2009.Q1-2016.Q4. Data diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) serta perhitungan estimasi *underground economy* menggunakan pendekatan moneter yang dikonstruksi oleh Vito Tanzi (1980) dan Faal (2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai *Underground Economy* periode 2009.Q1-2016.Q4 setara dengan 3,7% dari PDB. Sementara itu, akibat adanya kegiatan *underground economy*, potensi pajak yang hilang setara dengan 3,9% dari PDB.

Dari hasil penelitian dapat disarankan pemerintah perlu menempuh langkah-langkah yang dapat mereduksi kegiatan *underground economy*, antara lain dengan mengurangi hambatan untuk masuk (*barriers to entry*) ke sektor formal (*official economy*) melalui penurunan biaya, kecepatan dan ketepatan waktu serta kemudahan prosedur. Pemerintah perlu menggali potensi pajak dari kegiatan *underground economy* untuk meningkatkan penerimaan negara.

ABSTRACT

Yulianti, Avi. 2018. "Assessment of Underground Economy in Indonesia with the Monetary Approach". Final Project. Department of Economics Development. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si.

Keywords: Undreground Economy, Monetary Approach, Currency Demand, Tax Potential Loss

One of the major problems in estimating GDP is the absence of reliable, accurate, timely and consistent official economic and sosial statistics. One of them is that official statistics do not take into account the underground economy when estimating GDP. The growth of underground economy activity believed has potential tax loss. This research aims to: (1) analyze and calculate the size of underground economy based on the period 2009.Q1-2016.Q4. (2) analyze and calculate the potential tax loss due to the existence of underground economy activities.

This research use time series data based on the period 2009.Q1-2016.Q4. Data is obtained from Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), and Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) which is estimated by currency demand model by Vito Tanzi (1980) and Faal (2003).

The results showed that the size of the undeground economy on the periode 2009.Q1-2016.Q4 approximately 3,7% of GDP. Meanwhile, the potential tax loss due to the activity approximately 3,9% of GDP.

From the results of this research, it can be suggested that the government needs to take steps that can reduce underground economy activities, that is by reducing barriers to entering the formal sector through reduced costs, speed and timeliness and ease of prosedures. The government needs to explore tax potential from underground economy activities to increase state revenues.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI DAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Cakupan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Kegunaan Penelitian.....	10
1.7. Orisinalitas Penelitian	11
2. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	12

2.1.1. Definisi <i>Underground Economy</i>	12
2.1.2. Penyebab <i>Underground Economy</i>	16
2.1.3. Efek <i>Underground Economy</i>	18
2.1.4. Metode Pengukuran <i>Underground Economy</i>	20
2.2. Kajian Variabel Penelitian.....	22
2.2.1. Permintaan Uang.....	22
2.2.2. Produk Domestik Bruto (PDB).....	25
2.2.3. Beban Pajak	26
2.2.4. <i>Opportunity Cost</i>	27
2.2.5. Inflasi	28
2.2.6. Inovasi Keuangan	29
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	30
2.4. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	44
2.5. Kerangka Berpikir	46
2.5.1. Hubungan Variabel	46
2.5.1.1. Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Permintaan Uang Kartal	46
2.5.1.2. Pengaruh <i>Opportunity Cost</i> terhadap Permintaan Uang Kartal	47
2.5.1.3. Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang Kartal	48
2.5.1.4. Pengaruh Inovasi Keuangan terhadap Permintaan uang Kartal	48
2.5.1.5. Pengaruh Beban Pajak terhadap Permintaan uang Kartal	49

2.5.2. Kerangka Berfikir	49
2.6. Hipotesis Penelitian.....	50
3. METODE PENELITIAN	52
3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Jenis dan Sumber Data	52
3.3. Definisi Operasional Variabel	52
3.4. Metode Analisis Data	54
3.5. <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	55
3.6. Uji Asumsi Klasik	58
3.6.1. Multikolinieritas.....	59
3.6.2. Heteroskedastisitas.....	60
3.6.3. Autokorelasi.....	61
3.6.4. Normalitas	62
3.7. Uji Statistik.....	62
3.7.1. Uji t	62
3.7.2. Uji F	63
3.7.3. Koefisien Determinasi	64
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1. Gambaran Umum	65
4.1.1. Gambaran Umum <i>Underground Economy</i>	65
4.2. Hasil Analisis Data.....	67
4.2.1. Estimasi Permintaan Uang Kartal	67
4.2.2. Hasil Pengaruh Tarif Pajak terhadap <i>Underground Economy</i>	70

4.3. Uji Asumsi Klasik	71
4.3.1. Multikolinearitas	71
4.3.2. Heteroskedastisitas	72
4.3.3. Autokorelasi	72
4.3.4. Normalitas	72
4.4. Uji Statistik	73
4.4.1. Uji t-Statistik	74
4.4.2. Uji F-Statistik	75
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.5. Pembahasan	77
4.5.1. Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Permintaan Uang Kartal	77
4.5.2. Pengaruh <i>Opportunity Cost</i> terhadap Permintaan Uang Kartal	79
4.5.3. Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang Kartal	81
4.5.4. Pengaruh Inovasi Keuangan terhadap Permintaan Uang Kartal	83
4.5.5. Pengaruh Beban Pajak terhadap Permintaan uang Kartal	84
4.6. Pengukuran <i>Underground Economy</i>	86
4.7. <i>Underground Economy</i> dan Kebijakan Publik	90
5. PENUTUP	93
5.1. Simpulan	93
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB	1
Tabel 2.1. Klasifikasi <i>Underground Economy</i> Smith (1994)	12
Tabel 2.2. Klasifikasi <i>Underground Economy</i> Schneider & Enste (2002)	15
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1. Hasil Estimasi Permintaan Uang Kartal	68
Tabel 4.2. Hasil Pengaruh Tarif Pajak terhadap <i>Underground Economy</i>	70
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolinearitas	71
Tabel 4.4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	72
Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi	72
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rasio Pajak Indonesia	6
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoristis	50
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Residual	73
Gambar 4.2. Perkembangan Permintaan Uang Kartal dan PDB Indonesia.....	78
Gambar 4.3. Perkembangan Inflasi di Indonesia.....	82
Gambar 4.4. Perkembangan Permintaan Uang Kartal di Indonesia	82
Gambar 4.5. Perkembangan Nilai <i>Underground Economy</i>	87
Gambar 4.6. Perkembangan Nilai Potensi Pajak dari <i>Underground Economy</i> .	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Permintaan Uang Kartal, Pendapatan Disposabel, BI Rate, Inflasi, Inovasi Keuangan, dan Beban Pajak Tahun 2006.Q1-2016.Q4	98
2. Data Olahan (<i>Double-Log</i>).....	99
3. Hasil Output Regresi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).....	100
4. Hasil Uji Multikolinearitas	101
5. Hasil Uji Heteroskedastisitas	102
6. Hasil Uji Autokorelasi	104
7. Hasil Uji Normalitas	105
8. Hasil Estimasi Uang Kartal.....	106
9. Hasil Estimasi Nilai <i>Underground Economy</i>	107
10. Hasil Estimasi Pajak <i>Underground Economy</i>	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) suatu negara biasanya diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Begitupun dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Secara kumulatif, pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 tumbuh sebesar 5,03 persen. Dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Seri 2010 (Persen)
Tahun 2012-2016**

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 Persen				
	Laju Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.59	4.20	4.24	3.75	3.36
B. Pertambangan dan Penggalian	3.02	2.53	0.43	-3.42	0.95
C. Industri Pengolahan	5.62	4.37	4.64	4.33	4.26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.6	5.23	5.90	0.90	5.39
F. Konstruksi	6.56	6.11	6.97	6.36	5.22
H. Transportasi dan Perdagangan	7.11	6.97	7.36	6.71	7.45
J. Informasi dan Komunikasi	12.28	10.39	10.12	9.70	8.88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.54	8.76	4.68	8.58	8.90
L. Real Estate	7.41	6.54	5.00	4.11	4.69
M,N. Jasa Perusahaan	7.44	7.91	9.81	7.69	7.36
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.13	2.56	2.38	4.63	3.19

Sumber : (BPS, 2016)

Laju pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2016 sebesar 5.03 persen yakni mencapai angka Rp 12.406.774,10 Milyar (berdasar harga berlaku) sedangkan berdasar harga konstan (seri 2010) mencapai Rp 9.434.632,30 Milyar (Badan Pusat Statistik, 2016). Angka tersebut hanya menunjukkan aktivitas ekonomi yang tercatat di atas kertas kerja saja atau dengan kata lain belum menggambarkan realitas yang sesungguhnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu negara (seperti Indonesia) tidak semuanya masuk dalam perhitungan GDP. Artinya masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan tapi tidak masuk dalam perhitungan GDP. Contohnya adalah kegiatan pembalakan liar, penyelundupan barang masuk dan keluar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM), hewan-hewan yang dilindungi, dan barang-barang ilegal dari China ke Indonesia tanpa melalui pengawasan dan pemeriksaan Bea dan Cukai. Kegiatan ini biasa disebut *unofficially economy* atau *underground economy* yang sejak lebih dari satu dekade terakhir telah menjadi isu global (Scheineider, 2002). Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal tidak dipungutnya pajak impor dan tidak terbandungnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia (Samuda, 2016).

Underground economy merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara. *Underground economy* yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dimana komponen-komponennya meliputi konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M) atau dirumuskan oleh persamaan : $Y = C + I + G + X - M$.

Sebagai contoh misalnya kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor meliputi ekspor legal (L) dan ilegal (IL) sehingga $X = f(X_L, X_{IL})$. Kegiatan ekspor legal akan meningkatkan GDP tetapi ekspor ilegal tidak akan meningkatkan GDP. Artinya jika ekspor-ekspor ilegal ini masuk dalam perhitungan resmi GDP maka peningkatan ekspor ilegal ini akan meningkatkan GDP.

Ada beberapa alasan yang menjadikan pengukuran terhadap *underground economy* penting.

1. Kegiatan *underground economy* yang terus berkembang dan tidak diatasi dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh stakeholder yang menjadikan ukuran pertumbuhan sebagai indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, pendapatan dan konsumsi menjadi tidak akurat dan inefisien.
2. Kegiatan *underground economy* yang semakin besar menyebabkan penerimaan pada sektor perpajakan berkurang.
3. Meningkatnya aktivitas *underground economy* dapat dipandang sebagai reaksi dari pihak yang merasa terbebani oleh pajak dan memilih “*exit-option*” dibandingkan dengan “*voice option*” (samuda, 2016).
4. Perkembangan dari *underground economy* dapat menarik pekerja domestik dan luar negeri untuk beralih dari kegiatan ekonomi yang legal ke ilegal dan menciptakan kompetisi di antara keduanya.
5. Kegiatan *underground economy* dapat mengurangi jumlah (kuantitas) dan memperburuk kualitas barang-barang public (*public goods*) yang disediakan

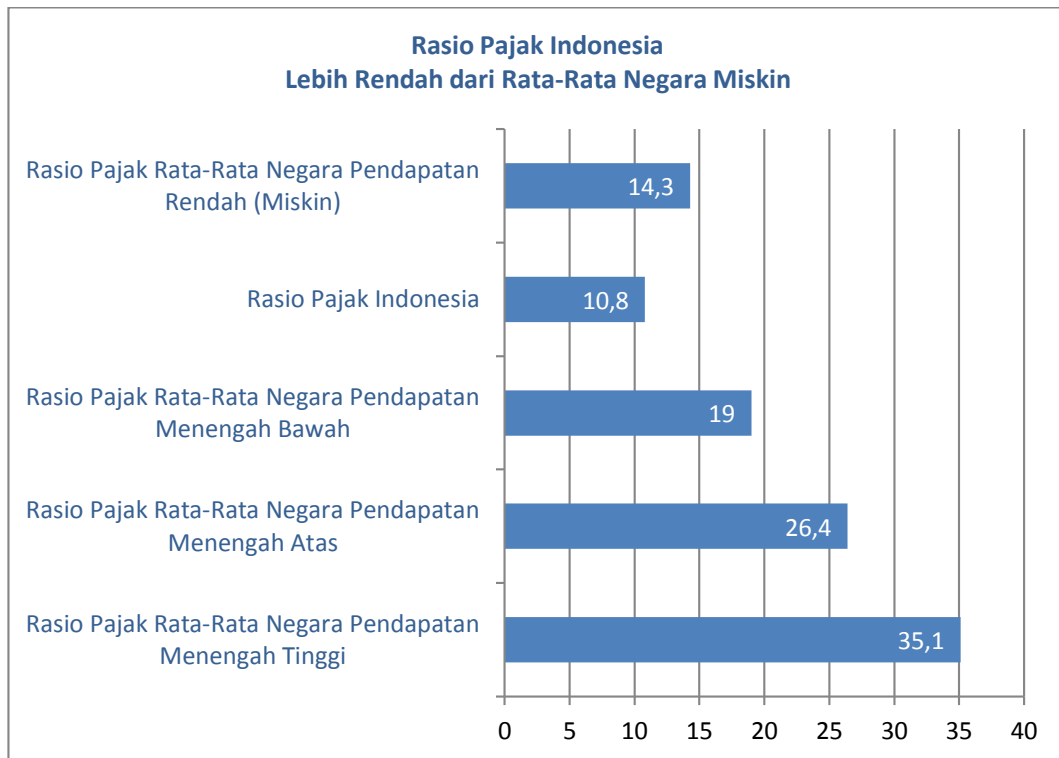
oleh Negara karena berkurangnya investasi dalam infrastruktur (Nizar dan Purnomo, 2011).

Dalam perhitungan besarnya *underground economy* masih ditemukan kesulitan dikarenakan belum ada konsensus dari konsep *underground economy* itu sendiri. Selain itu, para pelaku *underground economy* umumnya tidak ingin diketahui dan menyembunyikan identitasnya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa data yang akurat dari beberapa indikator ekonomi dapat digunakan sebagai proksi untuk mengukur *underground economy*, salah satunya dengan pendekatan moneter yaitu dengan melihat elastisitas permintaan uang kartal terhadap beban pajak yang diperkenalkan oleh Tanzi (2000) dan Faal (2003). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kegiatan *underground economy* ingin menghindari kewajiban membayar pajak yang dibebankan padanya.

Sejumlah ekonom di Indonesia juga pernah menyampaikan perkiraan tentang *underground economy* di Indonesia. Chatib Basri, menyebutkan bahwa *underground economy* di Indonesia diperkirakan mencapai 40% dari PDB (Gunadi, 2004). Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Faisal Basri dengan perkiraan sekitar 30% - 40% yang berasal dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, atau usaha secara sembunyi-sembunyi atau di sektor informal sehingga tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB (Gunadi, 2004). Indikator yang digunakan dalam estimasi tersebut adalah pertumbuhan konsumsi listrik yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri semen, serta tidak terjadinya revolusi sosial kendati angka resmi pengangguran sekitar 40 juta orang.

Dalam konteks perpajakan terkini, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan tentang pengampunan pajak yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tentang pengampunan pajak yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam menata masa depan keuangan dan perpajakan nasional, sebagai upaya untuk memperkecil rasio terhadap *underground economy* terhadap PDB.

Struktur perpajakan Indonesia bisa dilihat dari beberapa indikator. Jika dilihat dari rasio pajak, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), rasio pajak Indonesia masih berkisar 10,8% terhadap PDB. Rasio ini termasuk dalam kategori rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dan rata-rata pajak negara adalah sebesar 19%.



Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia

Sumber : IMF dan APBN, 2016

Rasio ini jelas masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun negara-negara OECD (keduanya sekitar 14%). Terlepas dari berkembangnya diskusi tentang bagaimana cara perhitungan *tax ratio* tersebut, namun pada kondisi di Indonesia masih dapat dianggap dalam kondisi *undertaxing*. Berdasarkan kalkulasi IMF, kapasitas penerimaan pajak Indonesia kini hanya mendekati 60%. Artinya, potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai 40%. Padahal IMF dikenal sebagai lembaga yang konservatif, yang artinya kalkulasi dari potensi ini pun kemungkinan masih minimal.

Dengan adanya fasilitas pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di

bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan, masyarakat yang tercakup dalam kegiatan *underground economy* yang tidak masuk dalam pengawasan otoritas pajak diharapkan dapat melaporkan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini akan diangkat judul “**PENILAIAN *UNDERGROUND ECONOMY* INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MONETER**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Tingkat kesejahteraan suatu negara sampai saat ini masih diukur melalui parameter Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, PDB yang selama ini dianggap sebagai salah satu metode terbaik dalam menghitung pendapatan nasional, memprediksi pertumbuhan ekonomi, serta mengindikasikan kinerja perekonomian suatu negara ternyata memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan dalam mengestimasi PDB yaitu tidak dimasukkannya kegiatan *underground economy*. Kelemahan tersebut membuat penghitungan PDB menjadi *underestimate* sehingga tidak dapat merefleksikan perekonomian suatu negara yang sebenarnya.

1.3. Cakupan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel permintaan uang kartal (C), beban pajak (T), pendapatan nasional (Y), *opportunity cost* (R), inflasi (Inf), dan inovasi keuangan (F).
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan moneter yaitu dengan melihat elastisitas permintaan uang kartal terhadap beban pajak.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada periode 2009.Q1-2016.Q4.

1.4. Perumusan Masalah

Definisi *underground economy* memainkan peran penting dalam menilai ukurannya. Dengan memiliki definisi yang jelas, sejumlah ambiguitas dan kontroversi dapat dihindari. Secara umum, ada dua jenis kegiatan *underground economy*, yaitu ketenagakerjaan gelap dan rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa yang kebanyakan dikonsumsi dalam rumah tangga.

Seringkali disalahartikan bahwa *underground economy* adalah aktivitas yang bersifat ilegal, misalnya penyelundupan, perjudian, penggelapan dan lain-lain. Padahal terminology *underground economy* meliputi baik aktivitas legal maupun ilegal. Ilegal berarti bertentangan atau melawan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud legal adalah bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada, namun penghasilan dari aktivitas tersebut tidak dilaporkan kepada institusi pemerintah, dengan alasan, yaitu (i) untuk menghindari pembayaran pajak; (ii) untuk menghindari pembayaran kontribusi

perlindungan sosial; (iii) menghindari standar yang telah ditetapkan seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, standar keselamatan, dst. (iv) menghindari penyetujuan terhadap prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

Perhitungan estimasi *underground economy* bisa direpresentasikan menggunakan pendekatan moneter dengan model persamaan regresi yang dikonstruksi oleh Vito Tanzi (1980) dan Faal (2003) melalui pengukuran sensitivitas permintaan uang kartal. Perhitungan kegiatan ekonomi informal di 162 negara dari tahun 1999 sampai 2006-2007 mengungkapkan seberapa besar nilai *underground economy* negara tersebut, rata-ratanya adalah sepertiga ukuran informal dari negara tersebut. Menurut perhitungan ini, perkiraan ukuran rata-rata *underground economy* sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto “resmi” adalah 37,6 persen di Afrika Sub-Sahara; 36,4 persen di Eropa dan Asia Tengah (kebanyakan negara transisi); dan 13,4 persen di negara-negara berpendapatan tinggi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Beban pajak, dikombinasikan dengan peraturan pasar tenaga kerja, kualitas dan kuantitas barang dan jasa publik, adalah kekuatan pendorong *underground economy*.

Informasi tentang pengukuran *underground economy* sangat penting untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien tentang alokasi sumber daya suatu negara, apalagi berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan bahwa negara-negara dengan tingkat perekonomian yang masih berkembang seperti Indonesia, aktivitas kegiatan *underground economy* justru diperkirakan meningkat.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapat jawaban dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana nilai kegiatan *underground economy* di Indonesia pada periode 2009.Q1-2016.Q4?
2. Bagaimana potensi penerimaan pajak yang hilang akibat adanya kegiatan *underground economy* tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis besarnya nilai kegiatan *underground economy* di Indonesia pada periode 2009.Q1- 2016.Q4.
2. Mengetahui dan menganalisis besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan *underground economy* tersebut.

1.6. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat teoritis keilmuan. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai sumber pengetahuan mengenai besarnya nilai *underground economy* dan potensi pajak yang hilang akibat kegiatan *underground economy* di Indonesia.

2. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan manfaat secara praktis bagi perumusan kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambil kebijakan dalam upaya pengurangan nilai *underground economy* dan potensi pajak yang hilang di Indonesia.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan *underground economy* di Indonesia antara lain:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan variabel dalam penelitian terdahulu yaitu variabel inovasi tidak digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi permintaan uang kartal di Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu berupa data triwulanan dari tahun 2009.Q1-2016.Q4.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Definisi *Underground Economy*

Terkait definisi *underground economy*, sampai saat ini belum terdapat konsensus di antara para ahli ekonomi. Dalam sejumlah literatur dijumpai beberapa definisi yang berbeda. Perbedaan definisi tersebut tergantung dari objek dan pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengidentifikasi aktivitas ekonomi. Philip Smith (1994) dalam Faal (2003), misalnya mendefinisikan *underground economy* sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa atas dasar harga pasar (*market based production*), baik yang legal maupun ilegal, namun kegiatan tersebut tidak tercatat, atau tidak dilaporkan dalam statistik sehingga luput dari penghitungan PDB resmi (*official GDP*).

Adapun klasifikasi aktivitas *underground economy* menurut Smith (1994) dalam Faal (2003) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi *Underground Economy*

Klasifikasi Aktivitas <i>Underground Economy</i>		
Aktivitas	Jenis Transaksi	
	Transaksi Moneter	Transaksi Non-moneter
Illegal	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan barang hasil curian	<ul style="list-style-type: none">• Barter obat-obatan terlarang

	<ul style="list-style-type: none"> • Industri dan penjualan obat-obatan terlarang • Perjudian • Prostitusi • Pencucian uang • Penyelundupan • Penggelapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencurian untuk digunakan sendiri • Produksi obat-obatan terlarang untuk penggunaan sendiri
Legal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang tidak dilaporkan • Upah, gaji, dan asset dari pekerjaan yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa yang legal • Pembayaran di bawah faktur • Diskon untuk karyawan • Tunjangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang tidak dilaporkan • Upah, gaji, dan asset dari pekerjaan yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa legal • Pembayaran di bawah faktur • Diskon untuk karyawan • Tunjangan

Sumber : Smith, 1994

Feige (1990) mengelompokkan *underground economy* ke dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. *The illegal economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak sah yang memasukkan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan (undang-undang), seperti jual-beli barang-barang hasil curian, pembajakan, penyelundupan, perjudian, dan transaksi-transaksi obat bius dan narkotika.
2. *The unreported economy*, yaitu pendapatan yang tidak dilaporkan, khususnya kepada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
3. *The unrecorded economy*, yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah namun tidak tercatat. Akibatnya terjadi perbedaan antara

jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

4. *The informal economy*, yaitu pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang, tidak memiliki perjanjian kerja, atau kredit keuangan.

Pengelompokan *underground economy* oleh Feige di atas juga sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Tanzi (2002), bahwa *underground economy* merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak (seperti golongan *unreported economy* pada definisi menurut Feige).

Definisi *underground economy* menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercermin dalam istilah “kegiatan sektor informal”, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yang : (i) bekerja *sendiri* tanpa dibantu orang lain; (ii) bekerja dibantu pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap; dan (iii) merupakan pekerja bebas pada sektor pertanian dan luar pertanian. Sedangkan Vito Tanzi (1983), mendefinisikan *underground economy* sebagai pendapatan yang didapat dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak (seperti golongan *unreported economy* pada definisi menurut Feige). Menurut Tanzi, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan *underground economy*.

Lebih lanjut, Schneider & Enste (2002) memberikan definisi *underground economy* berdasarkan klasifikasi kegiatan dan transaksi (**Tabel 2.2**).

Tabel 2.2. Klasifikasi *Underground Economy*

Bentuk Aktivitas	Transaksi Moneter		Transaksi Non Moneter	
Aktivitas Ilegal	Perdagangan dalam barang curian, obat-obatan terlarang, prostitusi, perjudian, penyelundupan, pembajakan, penipuan		Barter dalam obat-obat terlarang, barang curian, barang bajakan, memproduksi atau menanam tanaman obat terlarang untuk digunakan sendiri, mencuri untuk digunakan sendiri	
	Tax Evasion	Tax Avoidance	Tax Evasion	Tax Avoidance
Aktivitas Legal	Pendapatan dari bekerja sendiri yang tidak dilaporkan, upah, gaji dan asset pekerjaan yang tidak dilaporkan yang berkaitan dengan barang dan jasa legal	Tunjangan pegawai dan jaminan sosial	Barter barang dan jasa legal	Semua pekerjaan yang dilakukan sendiri dan bantuan tetangga

Sumber : Schneider & Enste, 2002

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa definisi *underground economy* sangat luas, yang meliputi pendapatan dari produksi barang-barang dan jasa-jasa legal yang tidak dilaporkan, baik yang bersumber dari transaksi moneter ataupun non-moneter (barter). Artinya, definisi ini juga mencakup semua kegiatan ekonomi yang secara umum dapat dikenakan pajak yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Menurut Schneider & Enste, kegiatan *underground economy* yang luput dari otoritas publik karena beberapa alasan, yaitu : (i) untuk menghindari pembayaran pajak (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya; (ii) untuk menghindari pembayaran kontribusi jaminan sosial; (iii) untuk menghindari pemenuhan standar tertentu dari pasar tenaga kerja, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, dan standar keamanan; dan (iv) untuk menghindari pemenuhan prosedur administratif tertentu, seperti pengisian kuesioner statistik atau bentuk-bentuk administrasi lainnya.

2.1.2. Penyebab *Underground Economy*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas *underground economy*, yaitu sebagai berikut (Schneider, Buehn, and Montenegro, 2007):

- (1) Beban pajak dan jaminan sosial (*social security*). Beban pajak dan jaminan sosial adalah faktor utama yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan kegiatan *underground economy*. Beban pajak yang semakin besar, akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Selain itu, apabila perbedaan antara total biaya tenaga kerja dalam ekonomi resmi (*official economy*) dengan pendapatan setelah pajak yang diperoleh dari bekerja semakin besar, semakin besar insentif pekerja untuk bekerja dalam *underground economy*. Namun demikian, reformasi pajak besar-besaran sekalipun, misalnya melalui penurunan tarif pajak, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya kegiatan *underground economy* secara substansial. Reformasi bisa menstabilisasi ukuran *underground economy* dan

mencegah peningkatan lebih lanjut. Akan tetapi, jaringan sosial dan hubungan personal, keuntungan yang tinggi dari kegiatan yang tidak lazim, serta investasi riil dan sumber daya manusia bisa mencegah masyarakat kembali beraktivitas dalam *official economy*.

- (2) Peningkatan intensitas regulasi pemerintah, yang seringkali diukur dengan jumlah undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan faktor penting yang dianggap menambah biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk terlibat dalam ekonomi formal (*official economy*). Misalnya, regulasi pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan (*trade barriers*), restriksi penggunaan tenaga kerja asing, dan hambatan-hambatan untuk memasuki (*barriers to entry*) sektor formal. Regulasi yang semakin banyak akan membuat birokrasi berbelit-belit dan meningkatkan beban para pelaku ekonomi. Semakin besar beban tersebut maka menjadi semakin tidak ekonomis, sehingga dapat menjadi penyebab pelaku ekonomi memilih bekerja dalam *underground economy*. Implikasi yang muncul akibat peningkatan intensitas regulasi pemerintah ini telah dibuktikan secara empiris oleh Simon Johnson *et.al* (1997), dengan kesimpulan bahwa : *pertama*, negara yang mempunyai regulasi yang lebih banyak cenderung memiliki *underground economy* yang lebih besar; dan *kedua*, beban pajak yang semakin besar akan mendorong *underground economy* yang besar pula.
- (3) Pelayanan sektor publik. Peningkatan aktivitas *underground economy* bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara, yang pada gilirannya mengurangi kualitas dan kuantitas penyediaan barang-barang dan jasa publik. Hal ini pada

akhirnya akan menyebabkan meningkatnya tarif pajak untuk perusahaan dan individu di sektor-sektor resmi. Tidak jarang kondisi ini dibarengi dengan memburuknya kualitas barang-barang publik (seperti infrastruktur) dan administrasi, dengan konsekuensi semakin kuatnya insentif untuk terlibat dalam kegiatan *underground economy*.

- (4) Kegiatan ekonomi resmi (*official economy*). Kondisi ekonomi resmi juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk bekerja pada *underground economy*. Dalam kondisi ekspansi ekonomi, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan uang tambahan lainnya. Sebaliknya dalam kondisi resesi ekonomi, para pelaku ekonomi berusaha mengkompensasi kehilangan pendapatan dari ekonomi resmi dengan melakukan kegiatan tambahan pada *underground economy*.

2.1.3. Efek *Underground economy*

Ada beberapa isu kebijakan yang serius yang mungkin timbul akibat pertumbuhan kegiatan *underground economy*, yaitu:

- (1) Penghindaran pajak (*tax evasion*) yang disebabkan oleh tarif pajak yang tinggi akan menggerus penerimaan, sehingga sulit mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan *enforcement*, karena itu pilihan kebijakan pajak juga ditentukan oleh bentuk *enforcement* yang diberlakukan.

- (2) Peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan *underground economy* merepresentasikan suatu bentuk “subsidi” untuk aktivitas ekonomi tertentu karena mudahnya melakukan penghindaran pajak. Hal ini seringkali menurunkan produktivitas perekonomian.
- (3) *Underground economy* menyebabkan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi menjadi kurang konsisten (*unreliable*), dan informasi ini bisa menyebabkan keputusan kebijakan ekonomi yang tidak tepat.
- (4) Dari sisi mikro, *underground economy* membuat kondisi persaingan tidak sehat di sektor tersebut dan tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah dan tidak membayar pajak, karena itu tingkat harga dapat lebih rendah dibandingkan *official economy* sehingga mampu meningkatkan penjualan dan menambah keuntungan. Semakin besar *underground economy* maka semakin besar potensi pajak yang hilang, hal tersebut berarti memperkecil penerimaan pemerintah dari pajak dan akan mengurangi investasi infrastruktur di sektor publik yang merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, misalnya dengan menaikkan tarif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak maka yang terjadi adalah *underground economy* akan semakin besar dan penerimaan pemerintah tidak akan bertambah secara signifikan.

Semua isu kebijakan di atas berkaitan dengan dampak negatif dari *underground economy*. Namun demikian, kegiatan *underground economy* juga memiliki beberapa dampak positif, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kadangkala mengeluarkan belanja yang berlebihan dan cenderung mubazir. Untuk mengatasi hal ini muncul kegiatan *underground economy* sebagai bentuk keberatan pajak (*tax protest*) agar pemerintah menyadari bahwa ada batas jumlah belanja bisa ditingkatkan.
- (2) Pemerintah kadangkala mengeluarkan regulasi tentang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan tidak efisien. Munculnya *underground economy* adalah karena pembeli dan penjual tidak bisa melakukan pertukaran secara legal. Dalam kasus ini, *underground economy* menjadi saluran yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*).
- (3) Efek positif yang mungkin ditimbulkan *underground economy* adalah penyediaan lapangan kerja, hal ini berarti dapat memberikan pendapatan pada masyarakat. Perusahaan dalam *underground economy* mempunyai struktur biaya yang lebih rendah dari *official economy*, jadi permintaan akan tenaga kerja dapat lebih besar. Di sisi lain kesejahteraan konsumen dapat meningkat karena harga yang lebih rendah, berakibat peningkatan daya beli masyarakat.

2.1.4. Metode Pengukuran *Underground economy*

Sangat sulit untuk mengukur secara tepat kegiatan *underground economy*. Beberapa ekonom menggunakan metode pendekatan yang belum tentu sama satu

dengan yang lain. Masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan, baik dari cara perhitungan maupun asumsi-asumsi dasar yang dibangun. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai *underground economy*, adalah sebagai berikut (Schneider and Enste, 2000 dan Tanzi, 2002):

- (1) Pendekatan langsung (*direct approaches*), yaitu : (i) melalui survey terhadap pelaku kegiatan yang masuk kategori *underground economy*, dan (ii) melalui audit pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan .
- (2) Pendekatan moneter, yang dilakukan dengan menganalisis sensitivitas permintaan uang kartal terhadap adanya faktor pendorong munculnya *underground economy* (salah satunya adalah beban pajak). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan *underground economy* lebih cenderung dilakukan menggunakan uang tunai dalam transaksi keuangan karena hal ini tidak mudah dilacak dibandingkan transaksi yang melibatkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.
- (3) Pendekatan diskrepansi dalam *official statistic*, yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah pengeluaran dan pendapatan dalam neraca nasional. Selain itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja.
- (4) Pendekatan konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi listrik yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi (aktivitas perekonomian), juga dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan *underground economy*.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Permintaan Uang

Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan atas teori Klasik dan teori Keynesian.

2.2.1.1. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang klasik diantaranya diwakili oleh teori moneter Irving Fisher yang disebut *teori kuantitas uang*. Teori ini berpandangan bahwa uang hanya sebagai alat tukar, maka uang akan berputar atau berpindah-pindah tangan dari satu pihak kepada pihak lainnya (*velocity*) selama suatu periode tertentu. Faktor yang memengaruhi velositas uang adalah faktor kelembagaan, utamanya mekanisme pembayaran yang digunakan (tunai atau cek). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan jumlah velositasnya (V) akan sama dengan jumlah produksi (T) dikalikan dengan harga jualnya (P), atau $MV = PT$. Karena output yang dihasilkan (T) adalah output pada kesempatan kerja penuh dan velositas uang (V) diasumsikan konstan, maka dalam jangka pendek jika M berubah, maka P juga berubah. Konsekuensinya adalah perubahan P karena perubahan M mempunyai hubungan searah dan proporsional.

2.2.1.2 Teori Permintaan Uang Keynes

John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, menolak anggapan ekonom Klasik yang menyatakan bahwa velositas uang (*velocity of money*) adalah konstan. Menurut Keynes, motif permintaan uang didorong oleh tiga hal, yaitu : (i) motif transaksi (*transactions motive*) (ii) motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan (iii) motif spekulasi

(*speculative motive*). Permintaan uang menurut Keynes merupakan permintaan uang riil atau disebut juga *liquidity preference function*, dimana permintaan uang riil (*real money balance*, Md/P) ditentukan oleh pendapatan riil (Y) dan *opportunity cost* (r). Velocitas uang (V) tidak konstan tetapi berfluktuasi seiring dengan pergerakan tingkat bunga. Berdasarkan fungsi preferensi likuiditas diketahui bahwa permintaan uang berhubungan negatif dengan tingkat bunga (r). Ketika r naik, permintaan uang turun, oleh karena itu *velocity of money* juga naik. Dengan kata lain, kenaikan tingkat bunga mendorong masyarakat untuk memegang *real money balance* lebih sedikit pada tingkat pendapatan yang tetap, sehingga tingkat perputaran uang menjadi lebih tinggi. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa tingkat bunga memainkan peranan yang penting dalam memengaruhi tingkat perputaran uang. Model permintaan uang spekulasi Keynes juga dapat menjelaskan fluktuasi perputaran uang. Ketika di masa yang akan datang tingkat bunga diharapkan lebih tinggi, maka harga obligasi turun dan pemegang obligasi mengalami *capital loss*. Dengan demikian, memegang uang akan menjadi lebih menarik daripada memegang obligasi, akibatnya jumlah permintaan uang akan naik dan *velocity of money* turun. *Velocity of money* akan berubah apabila ekspektasi tingkat bunga nominal di masa yang akan datang berubah dan ketidakstabilan ekspektasi tersebut akan menyebabkan *velocity of money* menjadi tidak stabil pula.

2.2.1.3. Teori Transaksi dari Permintaan Uang

Teori permintaan uang yang menekankan peran uang sebagai media pertukaran disebut teori transaksi (*transaction theories*). Teori ini menyatakan

bahwa uang adalah aset yang didominasi dan menekankan bahwa orang memegang uang, tidak seperti aset-aset lainnya, untuk melakukan pembelian. Teori ini menjelaskan dengan sangat baik mengapa orang memegang ukuran uang yang sempit, seperti uang tunai, sebagai lawan dari memegang aset yang mendominasi mereka, seperti rekening tabungan atau deposito.

Teori transaksi dari permintaan uang memiliki berbagai bentuk, yang bergantung pada bagaimana orang memodelkan proses menghasilkan uang dan melakukan transaksi. Seluruh teori ini mengasumsikan bahwa uang mempunyai biaya dari menerima tingkat pengembalian yang rendah dan manfaat yang membuat transaksi lebih aman. Orang-orang memutuskan berapa banyak uang yang akan dipegang dengan *trade-off*-kan biaya dan manfaat ini.

Model Baumol-Tobin menganalisis biaya dan manfaat dari memegang uang. Manfaatnya adalah kenyamanan, orang-orang memegang uang agar tidak perlu pergi ke bank setiap kali mereka ingin membeli sesuatu. Biaya kenyamanan ini adalah hilangnya bunga yang akan mereka terima jika uang itu mereka simpan di bank yang akan menghasilkan bunga. Salah satu implikasi dari model Baumol-Tobin adalah bahwa setiap perubahan biaya tetap pergi ke bank (F) mengubah fungsi permintaan uang, yaitu mengubah kuantitas uang yang diminta pada setiap tingkat bunga dan pendapatan tertentu. Semakin banyaknya kantor cabang bank maupun semakin banyaknya jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat menurunkan (F) dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menarik uang (Mankiw, 2007).

2.2.2 Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007). Ada dua cara untuk melihat statistik PDB, yaitu : (1) dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian; dan (2) dengan melihat PDB sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Untuk perekonomian secara keseluruhan, jumlah pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Karena setiap transaksi memiliki pembeli dan penjual, maka setiap rupiah yang dikeluarkan seorang pembeli harus menjadi pendapatan bagi seorang penjual. Ketika A membeli produk perusahaan B seharga Rp 1.000.000, maka Rp 1.000.000 menjadi pendapatan bagi perusahaan B dan pengeluaran bagi A. Transaksi itu menyumbang Rp1.000.000 pada PDB.

PDB seringkali dijadikan sebagai indikator tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran (*welfare*) di suatu negara. Namun demikian, PDB bukan merupakan ukuran yang sempurna untuk kesejahteraan ekonomi, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Perhitungan PDB mengabaikan pengurangan sumber daya dan lingkungan;
2. Tidak memperhatikan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (*income inequality*); PDB memasukkan sejumlah item yang jelas tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi (misalnya, perbaikan kerusakan akibat topan menambah PDB) dan mengecualikan item lain yang jelas memberikan kontribusi seperti kerja sukarela dan kerja rumah tangga

(orang tua yang mengajarkan anak-anaknya membaca; upah pembantu; dan petani yang langsung menjual produk ke pasar);

3. Tidak memasukkan kegiatan yang bersifat nonmaterial, karena PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur dengan nilai uang, misalnya ketenangan hidup karena menyandarkan hidup pada norma agama; dan
4. Mengabaikan kegiatan ekonomi yang tersembunyi (*underground economy*), yang meliputi semua pendapatan yang tidak dilaporkan dari sumber-sumber resmi dan sumber-sumber yang ilegal. Munculnya *underground economy* mengakibatkan hasil perhitungan PDB menjadi bias. Artinya, aktivitas ekonomi yang terjadi namun tidak masuk dalam perhitungan PDB (baik sengaja maupun tidak). Semakin besar *underground economy* maka bias perhitungan PDB semakin besar dan hasil perhitungan itu tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya.

2.2.3 Beban Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu kontributor utama dalam penyumbang pendapatan negara di APBN. Kemampuan negara mengumpulkan pajak dapat

dilihat pada *tax ratio*. Referensi dalam membandingkan *tax ratio* antar negara dilakukan berdasarkan panduan dari OECD dan *Government Financial Statistic Manual*(GFSM) 2001. Kedua referensi tersebut menjadi rujukan internasional dari segi cakupan, komponen pajak, dan struktur pajak. Pemerintah Indonesia sendiri mendefinisikan *tax ratio* dalam dua arti, yakni arti sempit dan arti luas. Arti sempit pada awalnya hanya terdiri dari pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat semata, tetapi pada tahun 2015 dilebarkan cakupan dengan pajak daerah. Sedangkan untuk arti luas, pada tahun sebelumnya terdiri dari pajak pemerintah pusat ditambah pajak daerah dan PNBP SDA Migas, tetapi pada tahun 2015 diubah dengan Pajak Pemerintah Pusat, PNBP SDA migas, serta PNBP Mineral dan Batubara (minerba).

2.2.4 Opportunity Cost

BI 7-Day RepoRate diasumsikan sebagai *opportunity cost* dari memegang uang. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994:76).

Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara resmi melalui media massa dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang beredar akan berkurang karena orang lebih

senang menabung daripada memutarakan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas dirumah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarakan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat resiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga.

2.2.5. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus menerus, bukan kenaikan atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan juga bukan hanya terjadi satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan secara terus menerus (Suparmoko, 2000).

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas uang menggambarkan analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam "*the equation of exchange*" : $MV = PT$. Dimana M = jumlah uang beredar, V = tingkat perputaran uang, T = volume

output, P = tingkat harga. Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output riil, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional.

Mishkin (1984, 2001) menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai *sustained inflation* atau inflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka baik ekonom aliran moneter maupun ekonom aliran Keynesian sependapat bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter. Untuk membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter, berbagai kajian yang dipelopori oleh Friedman (1963) dan dilanjutkan oleh berbagai kajian selanjutnya, telah dapat menguji bahwa dalam jangka panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

2.2.6 Inovasi Keuangan

Teori permintaan uang untuk transaksi Baumol-Tobin, menyatakan bahwa perkembangan jasa perbankan akan mengurangi biaya total untuk memegang uang, sehingga menyebabkan turunnya permintaan terhadap uang tunai (kartal). Ide dasar dalam analisis Baumol-Tobin adalah terdapat biaya peluang dari

memegang uang, dan terdapat sebuah keuntungan untuk memegang uang. Ketika suku bunga meningkat, orang mencoba untuk meminimumkan jumlah uang yang dipegang untuk tujuan transaksi, karena biaya peluang dari memegang uang meningkat.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi ekspor baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Kajian penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Metode	Model/Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Estimates of the Underground Economy In Australia</i>	Christopher Bajada (1997)	<i>Regresi Linier Berganda</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Uang Kartal 2. Pendapatan Disposabel 3. Tingkat Suku Bunga 4. Beban Pajak 5. Inflasi 6. Produk Domestik Bruto 7. Trend Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guncangan dalam ekonomi resmi mendorong pendapatan dan efek substitusi melalui perubahan dalam pendapatan dan pengangguran. 2. <i>Underground economy</i> secara signifikan terbukti memiliki implikasi buruk pada sifat siklus bisnis di Australia, yaitu bahwa keberadaan <i>underground economy</i> tidak dapat diabaikan dan menghasilkan siklus bisnis yang lebih mudah berubah. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan secara serius mempertimbangkan peraturan, peraturan, pajak, dan tunjangan kesejahteraan yang mungkin memicu antusiasme aktivitas <i>underground economy</i>.
2.	<i>Out of Shadows: Measuring Informal Economic Activity</i>	Friedrich Schneider, (2016)	<i>Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Pemerintahan 2. Bagian dari Pajak Langsung 3. Total Beban Pajak 4. Kebebasan Fiskal 5. Kebebasan Bisnis 6. Kebebasan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam semua negara yang diteliti, <i>underground economy</i> telah mencapai ukuran besar, dengan nilai rata-rata 33.0 persen dari PDB resmi untuk 162 negara dari tahun 1999 hingga tahun 2007. 2. <i>Underground economy</i> adalah

				<ul style="list-style-type: none"> 7. Tingkat Pengangguran 8. PDB Per Kapita 9. Kualitas Kebijakan 10. Keefektivan Pemerintah 11. Keterbukaan 12. Tingkat Inflasi 13. Tingkat Pertumbuhan PDB Per Kapita 14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 15. Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja 16. Mata Uang 	<p>fenomena kompleks yang penting dalam semua jenis ekonomi (berkembang, transisi, dan sangat berkembang). Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan <i>underground economy</i> karena berbagai alasan. Di antara yang paling penting adalah tindakan pemerintah, terutama perpajakan dan regulasi.</p> <p>3. Ada perbedaan regional di tingkat informalitas tetapi kelompok regional yang jelas. Di tingkat informalitas teratas, peneliti menemukan Afrika Sub-Sahara, pada tingkat informalitas terendah, peneliti menemukan negara-negara OECD.</p>
3.	<i>Outside the State – the Shadow Economy and Shadow Economy Labor Force</i>	Friedrich Schneider (2015)	<i>Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beban Pajak dan Kontribusi Jaminan Sosial 2. Kualitas Lembaga 3. Kebijakan 4. Pelayanan Sektor Publik 5. Moral Pajak 6. Pencegahan 7. Sektor Pertanian 8. Pengembangan Ekonomi 	<p>Wirausaha dan pengangguran adalah dua hal yang sangat penting kekuatan pendorong <i>underground economy</i>. Pengangguran dapat dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan ekonomi dalam pengertian Keynesian tradisional, alternatifnya, pemerintah dapat mencoba meningkatkan daya saing negara untuk meningkatkan permintaan luar negeri. Dampak dari</p>

				<p>Resmi 9. Pengusaha</p>	<p>berwirausaha pada <i>underground economy</i> hanya sebagian dikendalikan oleh pemerintah dan mungkin ambigu dari perspektif kesejahteraan. Pemerintah dapat melakukan deregulasi ekonomi atau memberikan insentif "untuk menjadi pengusaha sendiri", yang akan membuat wirausaha lebih mudah, berpotensi mengurangi pengangguran dan berkontribusi positif terhadap upaya dalam mengendalikan ukuran <i>underground economy</i>. Namun tindakan semacam itu perlu disertai dengan penguatan lembaga dan moral pajak untuk mengurangi kemungkinan bahwa wiraswasta menggeser proporsi kegiatan ekonomi mereka ke dalam <i>underground economy</i>, yang, jika itu terjadi, membuat kebijakan pemerintah memberi insentif kepada wirausaha kurang efektif. Tantangan utama adalah untuk membawa kegiatan <i>underground economy</i> ke dalam ekonomi resmi dengan cara barang dan jasa yang sebelumnya diproduksi dalam <i>underground economy</i> masih</p>
--	--	--	--	-------------------------------	---

					diproduksi dan disediakan tetapi di ekonomi resmi. Baru setelah itu, pemerintah mendapat pajak tambahan dan kontribusi jaminan sosial.
4.	<i>Underground Economy</i> di Indonesia	Sri Juli Asdiyanti Samuda (2016)	Pendekatan moneter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Uang Kartal 2. Inflasi 3. Beban Pajak 4. Suku Bunga Deposito Satu Bulan 5. Produk Domestik Bruto (PDB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan moneter dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya <i>underground economy</i> di Indonesia, yang ditunjukkan melalui variabel beban pajak yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah permintaan uang kartal. 2. Dengan menggunakan pendekatan moneter, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2001-2013, rata-rata besarnya <i>underground economy</i> di Indonesia adalah sebesar Rp 94.141,25 miliar atau sekitar 8,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk setiap triwulannya. 3. Potensi pajak yang hilang akibat aktivitas <i>underground economy</i> di Indonesia periode 2001-2013 rata-rata sebesar Rp. 11.172,86 miliar atau sekitar 1,00 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per triwulan.

5.	Faktor-faktor yang Menentukan Besaran <i>Shadow Economy</i> pada <i>Brics Countries</i> dan Indonesia	Acwin Hendra Saputra, Rahadi Nugroho	<i>Panel EGLS (Cross-Section Random Effects)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Control of Corruption (COC)</i> 2. <i>Government Effectiveness (GE)</i> 3. <i>Voice and Accountability</i> 4. <i>Political Stability and Absence of Violence</i> 5. <i>Regulatory Quality</i> 6. <i>Rule of Law</i> 7. <i>Tax Revenue (% of GDP)</i> 8. <i>Credit market regulation (CMR)</i> 9. <i>Labor market regulations (LMR)</i> 10. <i>Bureaucracy costs (BC)</i> 11. <i>Extra payments/ bribes/favoritism</i> 12. <i>Business regulations (BR)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotesis bahwa performa pemerintahan di suatu negara akan berpengaruh secara signifikan pada besaran <i>shadow economy</i> hal ini terbukti dengan hasil pengujian independen variabel dari <i>worldwide governance indicators</i> baik indikator secara individual (<i>control of corruption (COC)</i>, <i>government effectiveness (GE)</i>, <i>credit market regulation (CMR)</i>, <i>labor market regulation (LMR)</i>, <i>bureaucracy costs (BC)</i>, <i>extra payments/bribes/favoritism (EP)</i>, <i>business regulations (BR)</i>, dan <i>tax revenue (TR)</i>) atau pun secara rata-rata (<i>average</i>) yang signifikan. 2. Hipotesis regulasi/kebijakan terkait pasar kredit (<i>credit markets</i>), pasar tenaga kerja (<i>labor markets</i>), biaya birokrasi, <i>extra payments/bribes/favoritism</i> dan bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berpengaruh secara signifikan pada besaran <i>shadow economy</i> secara umum terbukti dari kesesuaian model ini yang relatif bagus. 3. Hipotesis beban pajak (yang
----	---	--------------------------------------	--	---	---

					tercermin dari proxy penerimaan pajak) akan berpengaruh pada besaran <i>shadow economy</i> terbukti melalui pengujian t-test dari independen variabel <i>tax revenue</i> untuk ketiga model baik, <i>individual worldwide governance indicators</i> , <i>average worldwide governance indicators</i> dan <i>average government regulation</i> yang selalu memiliki pengaruh pada dependen variabel <i>shadow economy</i> pada baik pada signifikansi statistik 1%, 5% maupun 10%.
6.	<i>Shadow Economies around the World: New Results for 158 Countries over 1991-2015</i>	Leandro Medina, Friedrich Schneider (2017)	<i>Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan perdagangan 2. Tingkat pengangguran 3. PDB per kapita 4. Ukuran pemerintahan 5. Kebebasan fiskal 6. Supremasi hukum 7. Pengendalian korupsi 	Dalam penelitian ini, penulis memperkirakan ukuran dan perkembangan ekonomi bayangan dari 158 negara selama periode 1991-2015. Menggunakan metode <i>MIMIC</i> yang diterapkan untuk pertama kalinya, pendekatan intensitas cahaya bukan GDP untuk menghindari masalah yang cukup sering GDP digunakan sebagai penyebab dan indikator variabel. Uji ketahanan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus keterbukaan perdagangan, tingkat pengangguran, PDB per

					kapita, ukuran pemerintahan, kebebasan fiskal, supremasi hukum, pengendalian korupsi sangat signifikan secara statistik. Menggunakan pendekatan intensitas cahaya sebagai variabel indikator terbukti menjadi alternatif, bukan PDB per kapita atau tingkat pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, jika kita memiliki data yang lebih banyak atau lebih baik dari variabel ini, ini dapat digunakan sebagai indikator.
7.	<i>Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?</i>	Leandro Medina, Friedrich Schneider (2018)	<i>Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi pajak dan jaminan sosial 2. Kualitas lembaga/korupsi 3. Regulasi 4. Pelayanan sektor publik 5. Moral Pajak 6. Pencegahan 7. Pengembangan ekonomi resmi 8. Wirausaha 9. Pengangguran 10. Ukuran sektor pertanian 11. Penggunaan uang tunai 12. Pembagian tenaga kerja 13. PDB per kapita 	Peneliti memperkirakan ukuran dan perkembangan ekonomi bayangan dari 158 negara selama periode 1991 hingga 2015 menggunakan metode dan spesifikasi alternatif yang berbeda. Dengan menggunakan metode MIMIC menerapkan (i) pendekatan intensitas cahaya daripada GDP, menghindari masalah bahwa GDP sering digunakan sebagai penyebab dan indikator variabel; dan (ii) metodologi PMM, yang memberikan hasil yang kuat dan menegaskan hasil dari MIMIC.

				(pertumbuhan ekonomi)	Uji ketahanan jelas menunjukkan bahwa dalam banyak kasus keterbukaan perdagangan, tingkat pengangguran, PDB per kapita, ukuran pemerintahan, kebebasan fiskal dan pengendalian korupsi sangat signifikan secara statistik. Hasilnya kuat ketika menggunakan pendekatan intensitas cahaya. Hasilnya juga kuat untuk menjatuhkan PDB dan PDB per kapita, sekali lagi hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, keterbukaan perdagangan, ukuran pemerintah, kebebasan fiskal, supremasi hukum dan korupsi secara statistik signifikan. Ini berlaku juga untuk sub-sampel. Oleh karena itu, dua jenis tes kekokohan ini menunjukkan bahwa hasil MIMIC mengarah pada hasil yang cukup kuat.
8.	<i>Currency Demand, The Underground Economy, and Tax Evasion: The Case of Guyana</i>	Ebrima Faal (2003)	<i>The Currency Demand Method</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan uang kartal 2. Produk Domestik Bruto 3. Beban pajak 4. <i>Opportunity cost</i> 5. Inflasi 6. Inovasi Keuangan 	Penelitian ini memperkirakan dan menganalisis ukuran dan konsekuensi dari ekonomi bawah tanah di Guyana menggunakan parsimonius dan model permintaan mata uang berdasarkan kesalahan-koreksi yang stabil.

					<p>Temuan ini menunjukkan adanya ekonomi bawah tanah yang besar di Guyana. Sementara bagian ekonomi bawah tanah turun secara substansial setelah pelaksanaan program reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1989, masih tetap tinggi pada 1990-an. Ekonomi bawah tanah mungkin termasuk kegiatan seperti penyelundupan ekspor lintas batas seperti emas dan berlian dan bahan bakar impor dan barang-barang konsumsi lainnya, serta layanan profesional dan informal swasta dan berbagai kegiatan ilegal lainnya.</p> <p>Keberadaan ekonomi bawah tanah yang cukup besar dari transaksi ekonomi domestik dan internasional yang tidak tercatat menunjukkan bahwa seri neraca nasional yang ada tidak memadai untuk analisis ekonomi yang berarti atau untuk perumusan kebijakan. Upaya harus dilakukan oleh otoritas nasional untuk membangun perkiraan yang kredibel dari komponen kunci ekonomi bawah tanah dengan maksud untuk memasukkannya dalam kompilasi</p>
--	--	--	--	--	--

					statistik resmi.
9.	<i>The Shadow Economy In Colombia: Size And Effects On Economic Growth</i>	Friedrich Schneider, Bettina Hametner (2007)	<i>Currency Demand Approach</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDB riil per kapita 2. Suku bunga bank deposito 3. Nilai kumulatif dari mesin ATM tunai 4. Rata-rata bersih tarif pajak pendapatan 5. Rata-rata bersih tarif pajak konsumsi 6. Keseluruhan pajak penghasilan dan konsumsi 7. Tingkat pengangguran 8. Pengeluaran nyata untuk pegawai negeri 	<p>Dengan menggunakan pendekatan permintaan uang kartal, peneliti menemukan ukuran ekonomi bayangan di Kolombia, selama periode 1976 hingga 2002. Setelah sedikit menurun pada tahun 80-an, kegiatan ekonomi bayangan meningkat lagi di tahun-tahun terakhir (1995 hingga 2002) sehingga ekonomi bayangan saat ini telah mencapai lebih dari 50% PDB “resmi” riil di Kolombia. Analisis empiris menunjukkan bahwa penyebab utama kegiatan bawah tanah adalah meningkatnya pengangguran yang memiliki efek besar pada pertumbuhan ekonomi bayangan, dan pada sisi lain peneliti menemukan pengaruh yang cukup besar yang disebabkan oleh peningkatan langsung dan tidak langsung perpajakan.</p> <p>Temuan kedua, peneliti menemukan efek positif dari ekonomi bayangan pada ekonomi pertumbuhan di Kolombia. Hasil menunjukkan hubungan positif yang jelas antara</p>

					ukuran ekonomi bayangan dan tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita. Rata-rata laju pertumbuhan PDB riil per kapita antara tahun 1977 dan 2002 adalah 1,11%, dan rata-rata antara 0,07 dan 0,27 persentase pertumbuhan dijelaskan oleh aktivitas ekonomi bayangan. Simulasi juga menunjukkan bahwa khususnya selama resesi, ekonomi bayangan setidaknya mengimbangi sebagian tingkat pertumbuhan negatif ekonomi resmi.
10.	<i>Currency Demand, the Subterranean Economy and Tax Evasion: The Case of Tanzania</i>	Manamba Epaphra, Moga Tano Jilenga (2017)	<i>The Gutmann Approach dan The Currency Demand Method</i>	<p><i>The Gutmann Approach :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDB nominal ekonomi bawah tanah 2. PDB nominal ekonomi resmi 3. Perputaran mata uang 4. Permintaan deposit 5. Perputaran rasio mata uang pada permintaan deposit 6. Permintaan uang kartal dalam arti sempit <p><i>The Currency Demand Method :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan uang kartal 	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan dan menganalisis ukuran dan konsekuensi dari ekonomi bawah tanah di Tanzania. Metode Gutmann memanfaatkan rasio deposito permintaan mata uang dan mengasumsikan bahwa ada rasio moneter yang akan tetap konstan dari waktu ke waktu jika tidak ada ekonomi kedua. Model permintaan mata uang atau pendekatan Tanzi berasumsi bahwa kegiatan dalam ekonomi bawah tanah sebagai hasil langsung dari pajak yang tinggi.

				<p>dalam arti sempit</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tarif pajak rata-rata 3. PDB riil per kapita 4. Tingkat inflasi 5. Urbanisasi 6. Tingkat suku bunga pada tabungan deposito 	<p>Kedua metode menghasilkan hasil yang berbeda terutama karena perbedaan cara di mana kedua metode ini menghitung kecepatan penghasilan. Juga, hasilnya mungkin peka terhadap asumsi yang dibuat, persamaan yang ditentukan, dan variabel penjelas yang dipilih.</p> <p>Terlepas dari perbedaan ukuran dan pertumbuhan ekonomi bawah tanah yang diberikan oleh dua pendekatan, signifikansi hasil ini sebagian besar tetap tidak berkurang. Kedua pendekatan menunjukkan adanya ekonomi bawah tanah yang besar di Tanzania. Fakta bahwa penggelapan pajak berkorelasi dengan ukuran dan pertumbuhan ekonomi bawah tanah, pendapatan pajak resmi sebagai persentase dari PDB telah stagnan. Hilangnya pendapatan pajak dan permintaan layanan publik oleh kegiatan di bawah tanah, dengan implikasi, dapat menjadi faktor signifikan untuk defisit fiskal yang tinggi dan ketergantungan bantuan yang terus-menerus.</p> <p>Dengan demikian upaya harus</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>diambil oleh pihak berwenang untuk mengurangi ukuran ekonomi bawah tanah. Reformasi fiskal seperti reformasi menyeluruh dari sistem perpajakan saat ini dan administrasinya ditambah peningkatan penyediaan layanan pemerintah seperti sertifikasi tanah dan layanan peradilan akan membantu mengurangi ukuran ekonomi kedua. Juga, tata kelola yang lebih baik dan institusi yang lebih kuat merupakan faktor penting untuk mengurangi ukuran ekonomi bawah tanah yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan pengumpulan pajak.</p>
--	--	--	--	--	---

2.4. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

1. Christopher Bajada (1997). *Estimates of the Underground Economy In Australia*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di negara Australia dan variabel yang diteliti berbeda, yaitu variabel inovasi keuangan.
2. Friedrich Schneider, PhD (2016). *Out of Shadows: Measuring Informal Economic Activity*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di berbagai negara dengan metode *Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)*.
3. Friedrich Schneider (2015). *Outside the State – the Shadow Economy and Shadow Economy Labor Force*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di berbagai negara dengan metode *Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)*.
4. Sri Juli Asdiyanti Samuda (2016). *Underground Economy di Indonesia*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy* dan potensi pajak yang hilang. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel inovasi keuangan dan periode penelitian yang diteliti berbeda.
5. Acwin Hendra Saputra dan Rahadi Nugroho. Faktor-faktor yang Menentukan Besaran *Shadow Economy* pada *Brics Countries* dan Indonesia. Persamaan

dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti pengaruh pajak terhadap besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menentukan besaran *underground economy* dengan metode panel EGLS.

6. Leandro Medina, Friedrich Schneider (2017). *Shadow Economies around the World: New Results for 158 Countries over 1991-2015*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di berbagai negara dengan metode *Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)*.
7. Leandro Medina, Friedrich Schneider (2018). *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di berbagai negara dengan metode *Multiple Indicator-Multiple Causes (MIMIC)*.
8. Ebrima Faal (2003). *Currency Demand, The Underground Economy, and Tax Evasion: The Case of Guyana*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Guyana dengan periode penelitian yang berbeda.
9. Friedrich Schneider, Bettina Hametner (2007). *The Shadow Economy In Colombia: Size And Effects On Economic Growth*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground*

economy. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Colombia dengan periode penelitian yang berbeda.

10. Manamba Epaphra, Moga Tano Jilenga (2017). *Currency Demand, the Subterranean Economy and Tax Evasion: The Case of Tanzania*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti besarnya nilai *underground economy*. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Tanzania dengan metode *The Gutmann Approach dan The Currency Demand Method*.

2.5. Kerangka Berpikir

2.5.1 Hubungan Variabel

2.5.1.1. Pengaruh Pendapatan Nasional Terhadap Permintaan Uang Kartal

Berdasarkan teori yang dikemukakan Keynes, pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan permintaan uang. Dalam penelitian ini, pendapatan diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto merupakan ukuran tingkat kegiatan ekonomi suatu negara, namun demikian Produk domestik bruto bukanlah merupakan indeks atau pengukur kesejahteraan yang memuaskan, meskipun demikian perlu memasukan variabel pendapatan dalam analisis jumlah uang beredar, karena memiliki prinsip dasar yang sama yaitu tindakan memilih dari individu sebagai pemilik kekayaan. Masyarakat yang pendapatannya tinggi akan mendorong bank-bank umum untuk meningkatkan pemberian jaminan kredit pinjaman kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar meningkat.

Dalam jangka panjang Produk Domestik Bruto dapat mempengaruhi jumlah uang beredar untuk dapat menghitung kenaikan tersebut dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga barang-barang yang berlaku pada satu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun ke tahun berikutnya.

Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Implikasi dari teori Fisher bahwa jumlah uang beredar di dalam masyarakat merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan pula dari tingkat output masyarakat (pendapatan nasional). Jadi jumlah uang pada analisa akhir ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional saja (Boediono, 2005 : 20).

2.5.1.2. Pengaruh *Opportunity Cost* Terhadap Permintaan Uang Kartal

Variabel *Opportunity cost* dalam penelitian ini diwakili oleh tingkat suku bunga yang merupakan *opportunity cost* dari memegang uang. Suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah uang beredar. Apabila suku bunga meningkat, maka jumlah uang beredar akan menurun, dan sebaliknya. Proses ini bekerja dari pengertian tingkat bunga dalam asumsi klasik, yang menganggap bahwa uang adalah produktif dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, ketika suku bunga tinggi, maka masyarakat akan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan sehingga jumlah uang beredar akan turun, dan sebaliknya, ketika suku bunga rendah, maka masyarakat tidak tertarik untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar bertambah.

2.5.1.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan Uang Kartal

Permintaan uang riil adalah permintaan terhadap uang kartal yang dihubungkan dengan perubahan harga barang dan jasa secara umum yang memengaruhi daya beli uang (*purchasing power of money*). Apabila terjadi inflasi maka dengan jumlah uang nominal yang sama, jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit atau dengan kata lain daya beli uang menjadi menurun. Oleh karena itu, secara teori hubungan antara permintaan uang kartal dengan inflasi adalah positif. Hal ini dikarenakan ketika inflasi meningkat maka untuk melaksanakan tingkat transaksi yang sama, jumlah uang yang dibutuhkan secara nominal akan meningkat pula.

2.5.1.4. Pengaruh Inovasi Keuangan Terhadap Permintaan Uang Kartal

Variabel inovasi keuangan dan perkembangan perbankan ditunjukkan oleh jumlah kantor cabang Bank Umum. Variabel ini merepresentasikan pelayanan perbankan. Semakin banyak jumlah kantor cabang bank maka layanan perbankan semakin baik. Pelayanan yang semakin baik akan mengurangi biaya untuk memegang uang, yang pada gilirannya juga akan menyebabkan berkurangnya permintaan atas uang. Hal ini sesuai dengan teori permintaan uang untuk transaksi Baumol-Tobin, yang menyatakan bahwa perkembangan jasa perbankan akan

mengurangi biaya total untuk memegang uang, sehingga menyebabkan turunnya permintaan terhadap uang tunai (kartal).

2.5.1.5. Pengaruh Beban Pajak Terhadap Permintaan Uang Kartal

Variabel beban pajak merupakan variabel penting untuk mengestimasi besaran aktivitas *underground economy* dan harus berpengaruh signifikan secara statistik terhadap permintaan uang kartal dalam model. Penggunaan uang kartal sebagai alat transaksi lebih memudahkan para pelaku *underground economy* untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Beban pajak berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas *underground economy*, dimana semakin tinggi beban pajak semakin besar pula aktivitas *underground economy* (Tanzi 2002 dan Faal 2003).

2.5.2. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah dimulai dari hipotesis kemudian melakukan analisis regresi, menentukan pendugaan model, melakukan estimasi, melakukan analisis hasil estimasi. Atas analisis hasil estimasi ditentukan estimasi permintaan uang kartal, estimasi uang kartal menjadi dasar penentuan estimasi nilai *underground economy*, kemudian menentukan estimasi nilai *potential loss* penerimaan pajak. Bagan kerangka pemikiran penelitian disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dibahas yang kebenarannya masih perlu di uji dalam penelitian. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka penelitian maka disusun hipotesis sebagai berikut:

a. Pendapatan Nasional

$H_0: \beta_1=0$, maka variabel Pendapatan Nasional tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

$H_a: \beta_1 > 0$, maka variabel Pendapatan Nasional berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

b. *Opportunity Cost*

$H_0: \beta_1 = 0$, maka variabel *Opportunity Cost* tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

$H_a: \beta_1 < 0$, maka variabel *Opportunity Cost* berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

c. Inflasi

$H_0: \beta_1 = 0$, maka variabel Inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

$H_a: \beta_1 < 0$, maka variabel Inflasi berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

d. Inovasi Keuangan

$H_0: \beta_1 = 0$, maka variabel Inovasi Keuangan tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

$H_a: \beta_1 < 0$, maka variabel Inovasi Keuangan berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

e. Beban Pajak

$H_0: \beta_1 = 0$, maka variabel Beban Pajak tidak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

$H_a: \beta_1 < 0$, maka variabel Beban Pajak berpengaruh secara nyata terhadap permintaan uang kartal.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPILAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai *Underground economy* di Indonesia periode 2009Q1-2016Q4 adalah sebesar Rp 987.036 Milyar dengan rata-rata mencapai Rp 30.844 Milyar per triwulan.
2. Nilai potensi penerimaan pajak yang hilang akibat *underground economy* di Indonesia periode 2009Q1-2016Q4 adalah sebesar Rp 2.679.210 Milyar dengan rata-rata mencapai Rp 83.725 Milyar per triwulan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan studi dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menempuh langkah-langkah yang dapat mereduksi kegiatan *underground economy*, antara lain dengan mengurangi hambatan untuk masuk (*barriers to entry*) ke sektor formal (*official economy*) melalui penurunan biaya, kecepatan dan ketepatan waktu serta kemudahan prosedur. Dengan berkurangnya kegiatan *underground economy*, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan Negara;
2. Sebagai alternatif, pemerintah perlu menggali potensi pajak dari kegiatan *underground economy* untuk meningkatkan penerimaan negara. Upaya

peningkatan penerimaan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menaikkan tarif pajak, misalnya melalui penyederhanaan peraturan perpajakan dan peningkatan jumlah wajib pajak, atau dengan menurunkan pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdiyanti, S. J. (2016). Underground Economy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* , Volume 19, Nomor 1, page 40-56.
- Azwar, & Mulyawan, A. W. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak. 60-78.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Produk Domestik Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bajada, C. (1997). Estimates of The Underground Economy in Australia. *Journal of Economic*.
- Bajada, C., & Schneider, F. (2007). The Size and Development of the Shadow Economies in the Asia-Pacific. 4-8.
- Bank Indonesia (BI). (2016). *BI Rate*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia (BI). (2016). *Inflasi* . Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia (BI). (2016). *Permintaan Uang Kartal*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boediono. (1994). *Teori Ekonomi Pembangunan* . Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Boediono. (2005). *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5*. Yogyakarta: BPFE.
- Chaudhuri, K., Schneider, F., & Chattopadhyay, S. (August 2006). The Size and Development of the Shadow Economy: An Empirical Investigation from States of India. *Journal of Development Economics*, Volume 80, No. 2 pg. 428-443.
- D'Hernoncourt, J., & Méon, P.-G. (2008). The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy? 1-8.
- Direktorat Penyusunan APBN. (2018). *Informasi APBN 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Ebrima, F. (2003). *Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion : The Case of Guyana*. Washington: International Monetary Fund.

- Faal, E. (2003). Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion : The Case of Guyana. *IMF Working Paper*.
- Feige, E. L. (1990). Defining and Estimating Underground and Informal Economies : The New Institutional Economics Approach. *World Development*, Vol. 18 No. 7.
- Feld, L. P., & Schneider, F. (2010). Survey On The Shadow Economy and Undeclared Earnings in OECD Countries . 3-14.
- Feld, L. P., Schmidt, A. J., & Schneider, F. (2010). Deterrence Policy and the Size of the Shadow Economy in Germany: An institutional and empirical analysis. 6-11.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Gujarati, Damodar, & Elmasari. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi, A. (2004). *Krisis dan Underground Economy di Indonesia*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Jilenga, M. T., & Epaphra, M. (2017). Currency Demand, the Subterranean Economy and Tax Evasion : The Case of Tanzania. *Economic and Social Thought*, Volume 4 June 2017 Issue 2.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2016). *Tax Ratio*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mankiw, N. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nizar, M. A., & Kuntarto, P. (2011). Underground Economy Activities in Indonesia. 1-38.
- Nizar, M. A., & Kuntarto, P. (t.thn.). Potensi Penerimaan Pajak dari Underground Economy di Indonesia. 1-38.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rasbin. (2013). Ekspektasi Underground Economy di Indonesia. 229-239.
- Saputra, A. H., & Nugroho, R. (2013). Faktor-Faktor yang Menentukan Besaran Shadow Economy pada Brics Countries dan Indonesia. 29-38.

- Schneider, F. (2002). *Hiding in the Shadows The Growth of The Underground Economy*. Washington: International Monetary Fund .
- Schneider, F. (2015). Outside the State : the Shadow Economy and Shadow Economy Labor Force. 1-36.
- Schneider, F. (2016). Out of Shadows : Measuring Informal Economic Activity . 35-49.
- Schneider, F., & D.H., E. (2002). Shadow Economies : Size, Causes and . *The Journal of Economic Literature*, Vol. 38, No. 1. pp. 77–114.
- Schneider, F., & Hametner, B. (2007). The Shadow Economy in Colombia : Size and Effects on Economic Growth.
- Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. (2010). Shadow Economies All Over the World : New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. *World Bank Policy Research Working Paper (5536, July)*, Washington : World Bank.
- Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. (Washington : World Bank). Shadow Economies All Over the World : New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. *World Bank Policy Research Working Paper (5536, July)*.
- Smith, P. (1994). *Assessing the Size of the Underground Economy: The Canadian Statistical Perspectives*. Canadian Economic Observer.
- Supardi, T. (2013). Estimasi Potential Loss Penerimaan Pajak dari Kegiatan Economy dengan Pendekatan Moneter. 71-86.
- Suparmoko. (2000). *Pokok – Pokok Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE atas penelitian laju inflasi dalam kenaikan harga umum secara terus menerus.
- Tanzi, V. (1983). The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-80. *IMF Staff Paper*, Vol 30. No. 2 Washington : International Monetary Fund.
- Tanzi, V. (2002). *The Shadow Economy, Its Causes and Its Consequences*. Edited Lecture: Brazilian Institute of Ethics.